

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kurikulum

Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Ayat 19 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan mengajar.²

Menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran (*out-comes*) yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Materi di dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (*goals*) dan tujuan (*objectives*) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sedangkan menurut Harsono, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa latin, kurikulum berarti *track* atau jalur pacu. Sedangkan secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.³

Kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar (KBM), kurikulum merupakan syarat mutlak bagi pendidikan di sekolah. Kurikulum merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendidikan atau pengajaran. Dapat dibayangkan, bagaimana bentuk pelaksanaan suatu pendidikan atau pengajaran di sekolah yang

¹ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4

² Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, PT Rosda Karya, Bandung, 2007, hlm. 91-92

³ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 9

tidak memiliki kurikulum. Dengan berpedoman pada kurikulum interaksi pendidikan antara guru dan siswa berlangsung. Interaksi ini tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi selalu terjadi dalam lingkungan tertentu, yang mencakup antara lain lingkungan fisik, alam, sosial budaya, ekonomi, politik, dan religi.⁴

Kurikulum pendidikan pertama Indonesia dikembangkan pada tahun 1947, yang diberi nama Rentjana Pembelajaran 1947. Kurikulum saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Ciri utama kurikulum ini adalah lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain.

Setelah Rentjana Pembelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum Indonesia mengalami penyempurnaan. Dengan berganti nama menjadi Rentjana Pelajaran Terurai 1952. Ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964 pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini diberi nama dengan Rentjana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program “pancawardhana” yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kerigelan dan jasmani.

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964. Yaitu perubahan struktur pendidikan dari “pancawardhana” menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Pembelajaran diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta pengembangan fisik yang sehat dan kuat.⁵

Kurikulum 1975 merupakan pengganti kurikulum 1968 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode dalam implementasi

⁴Nana Syaodi Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 3

⁵ A. Ferry T. Indratno (ed.), *Menyambut Kurikulum 2013*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 128

Kurikulum 1975 adalah Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Pada zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran yaitu pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran meliputi: petunjuk umum, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum (TIU), tujuan intruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi.

Kurikulum 1984 mengusung proses *skill approach*. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan masih menjadi faktor penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan “kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subyek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan model Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).⁶

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan Kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Selama dilaksanakannya kurikulum 1994 muncul beberapa permasalahan, terutama sebagai akibat dari kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi (*content oriented*), di antaranya sebagai berikut: Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi/substansi setiap mata pelajaran. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Permasalahan di atas mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Salah satu upaya

⁶ *Ibid.*, hlm, 129

penyempurnaan itu diberlakukannya suplemen kurikulum 1994 atau disebut Kurikulum 2004. Kurikulum ini diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap serangkat kompetensi tertentu. KBK diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggungjawab.⁷

Setelah KBK, tahun 2006 muncul lagi kurikulum yang dikatakan sebagai penyempurnaan dari KBK yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Terdapat perbedaan mendasar dibandingkan dengan KBK tahun 2004 dengan KBK tahun 2006 (versi KTSP), bahwa sekolah diberi kewenangan penuh dalam menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, mulai dari tujuan, visi-misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan hingga pengembangan silabusnya.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm, 130

⁸ *Ibid.*, hlm, 118

2. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 di madrasah secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 912 Tahun 2013. Dalam lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 912 Tahun 2013 dijelaskan poin-poin tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:⁹

a. Penyempurnaan Pola Pikir Kurikulum 2013

Untuk memenuhi pengembangan kerangka berpikir yang sesuai dengan kebutuhan, maka kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut:

- a) pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang sama;
- b) pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif guru-peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media lainnya);
- c) pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);
- d) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains);
- e) pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok (berbasis tim);
- f) pola pembelajaran alat tunggal menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia;
- g) pola pembelajaran berbasis massal menjadi kebutuhan pelanggan (*users*) dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik;
- h) pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal (*monodiscipline*) menjadi pembelajaran ilmu pengetahuan jamak (*multidisciplines*); dan

⁹ Dokumen Kurikulum Madrasah 2013, Peraturan Menteri Agama Nomor 912 Tahun 2013 dan lampirannya.

i) pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis.¹⁰

b. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 ini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

1. mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
2. madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;
3. mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di madrasah dan masyarakat;
4. memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
5. kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran;
6. kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (*organizing elements*) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;
7. kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal).¹¹

c. Tujuan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga

¹⁰ Dokumen Kurikulum Madrasah 2013, hlm. 7-8

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8-9

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.¹²

d. Komponen Kurikulum 2013

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 912 Tahun 2013 disebutkan sebagai berikut: bahwa kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah mencakup; Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian Pendidikan Agama Islam.¹³

1) Kerangka Dasar

a) Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.

Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.

Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut:¹⁴

¹² *Ibid.*, hlm. 9

¹³ *Ibid.*, hlm. 3

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4

- a. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.¹⁵ Pandangan ini menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.¹⁶
- b. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut pandangan filosofi ini, prestasi anak bangsa di berbagai bidang kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat

¹⁵ H.A.R. Tilaar, *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*, Kompas, Jakarta, 2012, hlm. 1039

¹⁶ Helmawati, *Pendidikan Karakter Sehari-hari*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 156

kematangan psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang dalam akademik, Kurikulum 2013 memosisikan keunggulan budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga, diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi, dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam kehidupan berbangsa masa kini.

- c. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu (*essentialism*). Filosofi ini mewajibkan kurikulum memiliki nama mata pelajaran yang sama dengan nama disiplin ilmu, selalu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.
- d. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*).¹⁷

Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang lebih baik.¹⁸

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai

¹⁷ H.A.R. Tilaar, *Op.cit.*, hlm. 1068

¹⁸ Dokumen Kurikulum Madrasah 2013, hlm.10

dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

b) Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (*taught curriculum*) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di madrasah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta didik (*learned-curriculum*) sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum.¹⁹

c) Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

¹⁹ *Ibid.*, hlm.11

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Sekolah /Madrasah.²⁰

2) Struktur Kurikulum 2013

a) Kompetensi Inti

Sejalan dengan filosofi progresivisme dalam pendidikan, Kompetensi Inti ibaratnya adalah anak tangga yang harus ditapaki peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi Inti (KI) meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar (KD) pada kelas yang berbeda dapat dijaga.²¹

Sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan multidimensi, Kompetensi Inti juga memiliki multidimensi. Untuk kemudahan operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua. Pertama, sikap spiritual yang terkait dengan tujuan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12

²¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 *tentang Kompetensi Inti*

pendidikan nasional membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kedua, sikap sosial yang terkait dengan tujuan pendidikan nasional membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.²²

Kompetensi Inti bukan untuk diajarkan melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. Dalam hal ini mata pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut. Tiap mata pelajaran harus tunduk pada Kompetensi Inti yang telah dirumuskan. Karena itu, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan Kompetensi Inti.

Kompetensi Inti akan menagih kepada tiap mata pelajaran apa yang dapat dikontribusikannya dalam membentuk kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik. Ibaratnya, Kompetensi Inti adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran.

Dalam konteks ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi Inti menyatakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi. Dengan demikian, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organising element*) kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar.

Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan

²² Lampiran, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 *tentang Kompetensi Inti*

kompetensi dasar satu kelas dengan kelas di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antar kompetensi yang dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.

Rumusan Kompetensi Inti dalam buku menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.²³

Selanjutnya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan untuk jenjang satuan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dipergunakan untuk merumuskan kompetensi dasar (KD) yang diperlukan untuk mencapainya..²⁴

b) Mata Pelajaran Madrasah

Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan melalui Kompetensi Inti. Selain itu, Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam berbagai mata pelajaran yang pada gilirannya berfungsi sebagai sumber kompetensi. Mata pelajaran yang dipergunakan sebagai sumber kompetensi tersebut harus mengacu pada ketentuan yang tercantum pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya ketentuan pada Pasal 37.

Selain jenis mata pelajaran yang diperlukan untuk membentuk

²³ *Ibid.*, hlm.13

²⁴ *Ibid.*, hlm.14

kompetensi, juga diperlukan beban belajar per minggu dan per semester atau per tahun. Beban belajar ini kemudian didistribusikan ke berbagai mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan dapat dihasilkan oleh tiap mata pelajaran.²⁵

c) Kompetensi Dasar

Sebagai rangkaian untuk mendukung Kompetensi Inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi dasar. Pencapaian Kompetensi Inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusannya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran sebagai pendukung pencapaian.

Kompetensi Inti, kompetensi dasar dikelompokkan menjadi empat sesuai dengan rumusan Kompetensi Inti yang didukungnya, yaitu: 1). Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual (mendukung KI-1) atau kelompok 1, 2). Kelompok kompetensi dasar sikap sosial (mendukung KI-2) atau kelompok 2, 3). Kelompok kompetensi dasar pengetahuan (mendukung KI-3) atau kelompok 3, dan 4). Kelompok kompetensi dasar keterampilan (mendukung KI-4) atau kelompok 4.

Uraian kompetensi dasar yang rinci ini adalah untuk memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan, dan bermuara pada sikap. Melalui Kompetensi Inti, tiap mata pelajaran ditekankan bukan hanya memuat kandungan pengetahuan saja, tetapi juga memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Selain itu juga memuat pesan tentang pentingnya memahami mata pelajaran tersebut sebagai bagian dari pembentukan sikap. Hal ini penting mengingat kompetensi pengetahuan sifatnya

²⁵ Lampiran, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2014 *tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah.*

dinamis karena pengetahuan masih selalu berkembang.

Kemampuan keterampilan akan bertahan lebih lama dari kompetensi pengetahuan, sedangkan yang akan terus melekat pada dan akan dibutuhkan oleh peserta didik adalah sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok Kompetensi Inti sikap (KI-1 dan KI-2) bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihafalkan, dan tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual sangat penting yang terkandung dalam materinya.

Dengan kata lain, kompetensi dasar yang berkenaan dengan sikap spiritual (mendukung KI-1) dan individual-sosial (mendukung KI-2) dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (mendukung KI-3) dan keterampilan (mendukung KI-4).

Untuk memastikan keberlanjutan penguasaan kompetensi, proses pembelajaran dimulai dari kompetensi pengetahuan, kemudian dilanjutkan menjadi kompetensi keterampilan, dan berakhir pada pembentukan sikap. Dengan demikian, proses penyusunan maupun pemahamannya (dan bagaimana membacanya) dimulai dari Kompetensi Dasar kelompok 3. Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 4.²⁶

Hasil rumusan Kompetensi Dasar kelompok 3 dan 4 dipergunakan untuk merumuskan Kompetensi Dasar kelompok 1 dan 2. Proses berkesinambungan ini untuk memastikan bahwa pengetahuan berlanjut ke keterampilan dan bermuara ke sikap sehingga ada keterkaitan erat yang mendekati linier antara kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap.²⁷

3) Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

²⁶ *Op.cit.*, hlm. 17

²⁷ *Ibid.*, hlm. 18

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.²⁸

Setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Aliyah diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

Tabel 1
Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah.

Madrasah Aliyah	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

²⁸ Lampiran, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 *tentang Standar Kompetensi Lulusan*

4) Standar Isi

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai pada suatu satuan pendidikan dalam jenjang dan jenis pendidikan tertentu dirumuskan dalam Standar Isi untuk setiap mata pelajaran.²⁹

Standar Isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional dalam domain sikap spritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, Standar Isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi tersebut. Ketiga kompetensi tersebut memiliki proses pemerolehan yang berbeda. Sikap dibentuk melalui aktivitas-aktivitas: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas-aktivitas: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan proses perolehannya mempengaruhi Standar Isi.

5) Standar Proses

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan

²⁹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 *tentang Standar Isi*

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Terkait dengan prinsip pembelajaran maka, dikembangkan Standar Proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.³⁰

6) Standar penilaian

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, penilaian dalam pengertian ini mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian madrasah, yang diuraikan secara ringkas sebagai berikut.³¹

1. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.
2. Penilaian diri (*self assessment*) merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik

³⁰ Lampiran, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Standar Proses

³¹ Lampiran, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Standar Penilaian

termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam (in class) atau di luar kelas (out class) khususnya pada perubahan sikap/perilaku dan keterampilan peserta didik.

4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih sesuai perencanaan yang dibuat antara pendidik dan peserta didik.
6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode tersebut.
7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua kompetensi dasar pada semester yang sudah berjalan.
8. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.

10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.
11. Ujian Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan.

a. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.

b. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.

a.) Penilaian kompetensi sikap

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (*peer evaluation*) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.³²

- 1) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku peserta didik yang diamati langsung oleh pendidik saat proses pembelajaran.

³² Lampiran, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 *tentang Penilaian Hasil Belajar*

- 2) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri yang berisi ceklis aspek kepribadian.
- 3) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik yang berisi cheklis tentang aspek yang dinilai.
- 4) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

b.) Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai peserta didik melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Sebelum melaksanakan penilaian kompetensi pengetahuan, pendidik telah menyiapkan instrumen penilaian yang meliputi; 1) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. 2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada peserta didik beserta pedoman penskorannya. 3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas yang akan dikerjakan peserta didik.

c.) Penilaian Kompetensi Keterampilan

Untuk mengetahui kompetensi keterampilan, seorang pendidik harus menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan

penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik.

Instrumen penilaian kompetensi keterampilan harus memenuhi persyaratan berikut yaitu: 1) substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai; 2) konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan; dan 3) penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.³³

3. Perbedaan Kurikulum KTSP dengan Kurikulum 2013

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dalam hal ini lembaga diberi kewenangan dan tanggung jawab secara luas untuk mandiri, maju dan berkembang berdasarkan kebijakan strategi manajemen pendidikan yang ditetapkan pemerintah dan ini merupakan kelebihan KTSP dibanding kurikulum sebelumnya. Kurikulum KTSP diharapkan, mampu menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam mengemban identitas budaya dan bangsa.³⁴

Dalam Kurikulum KTSP ada empat komponen, yaitu (1) tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, (2) struktur dan muatan KTSP, (3) kalender pendidikan, (4) silabus dan Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP).³⁵

Pada dasarnya Kurikulum KTSP memiliki banyak perbedaan dengan Kurikulum 2013. Berikut ini beberapa perbedaan esensial antara KTSP dengan Kurikulum 2013.

³³ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 81

³⁴ Muhammad Joko Susilo, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Menejemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm, 11.

³⁵ Masnur Muslich, *KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Dasar Pemahaman dan Pengembangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 12.

Tabel 2
Perbedaan Esensial Kurikulum

KTSP 2006	Kurikulum 2013
Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu	Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi
Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri	Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas
Bahasa Indonesia sebagai Pengetahuan	Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan <i>carrier of knowledge</i>
Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda	Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, dll.
Untuk, penjurusan ada sejak kelas XI	Tidak ada penjurusan SMA, yang ada adalah mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat
SMA dan SMK tanpa kesamaan Kompetensi	SMA dan SMK memiliki mata pelajaran yang sama terkait dasardasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap
Penjurusan di SMK tidak terlalu detail (sampai keahlian)	Penjurusan di SMK tidak terlalu detail (sampai bidang studi), di dalamnya terdapat pengelompokan peminatan dan pendalaman

Selain yang sudah disebutkan di atas, SKL (Standar Kompetensi Lulusan) dalam Kurikulum 2013 ditentukan terlebih dahulu melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.54 Tahun 2013, baru setelah itu ditentukan Standar Isi yang terdapat dalam Permendikbud No. 67, 68, 69, dan 70 Tahun 2013. Sedangkan pada KTSP, Standar Isi ditentukan terlebih dahulu 20 melalui Permendiknas No. 22 Tahun 2006, baru setelah itu SKL ditentukan melalui Permendiknas No. 23 Tahun 2006.

Pada Kurikulum 2013, Bimbingan dan Konseling (BK) menekankan pada pengembangan potensi siswa, sedangkan KTSP lebih pada menyelesaikan masalah siswa. Jumlah jam dalam Kurikulum 2013 lebih banyak dibandingkan

dengan KTSP, namun jumlah mata pelajarannya lebih sedikit. Aspek kompetensi lulusan dan penilaian Kurikulum 2013 menekankan pada aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan sedangkan pada KTSP hanya pada aspek pengetahuannya saja. Mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang pada KTSP adalah sebagai mata pelajaran, sedangkan dalam Kurikulum 2013 sebagai media pembelajaran.³⁶

4. Pendidikan Agama Islam di Madrasah

Struktur kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum Madrasah meliputi: 1) Al-Qur'an Hadis, 2) Akidah Akhlak, 3) Fikih, 4) Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Masing-masing mata pelajaran tersebut pada dasarnya saling terkait dan melengkapi.³⁷

- a. Al-Qur'an-Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti keduanya merupakan sumber akidah-akhlak, *syari'ah*/fikih (ibadah, *muamalah*), sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut.
- b. Akidah merupakan akar atau pokok agama. *Syariah*/fikih (ibadah, *muamalah*) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, yakni sebagai manifestasi dan konsekuensi dari keimanan dan keyakinan hidup. Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal itu menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, Kebudayaan/seni, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga/kesehatan, dan lain-lain) yang dilandasi oleh akidah yang kokoh.
- c. Fikih (*Syari'ah*) merupakan sistem atau seperangkat aturan yang

³⁶ E. Mulyasa, *Op.Cit.*, hlm. 172-173

³⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2014 *tentang Kurikulum Madrasah*.

mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*Hablum-Minallah*), sesama manusia (*Hablum-Minan-nasi*) dan dengan makhluk lainnya (*Hablum-Ma'al Ghairi*).

- d. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa ke masa dalam beribada, bermuamalah dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupan atau menyebarkan ajaran Islam yang dilandasi oleh akidah.

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah memiliki karakteristik sebagai berikut:³⁸

- a. Al-Qur'an Hadis, menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Akidah Akhlak menekankan pada kemampuan memahami keimanan dan keyakinan Islam sehingga memiliki keyakinan yang kokoh dan mampu mempertahankan keyakinan / keimanannya serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-asma' al-husna. Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan dan menghiasi diri akhlak terpuji (*mahmudah*) dan menjauhi serta menghindari diri dari akhlak tercela (*madzmumah*) dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari
- d. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan pada kemampuan mengambil ibrah/ hikmah (pelajaran) dari sejarah Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni, dan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 23-29

lain-lain, untuk mengembangkan Kebudayaan dan peradaban Islam pada masa kini dan masa yang akan datang.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah, Kementerian Agama RI telah menyiapkan Silabus Pembelajaran PAI di Madrasah dan juga menerbitkan Buku Pegangan Siswa dan Buku Pedoman Guru. Kehadiran Silabus setiap mata pelajaran PAI dan bahasa Arab bagi guru menjadi kebutuhan pokok dalam menerapkan Kurikulum 2013 di Madrasah.³⁹

5. Evaluasi Implementasi Kurikulum

a. Pengertian Evaluasi Implementasi Kurikulum

Implementasi di dalam kamus ilmiah populer karangan W.J.S. Purwadarminta adalah perihal (perbuatan usaha dan sebagainya) melaksanakan (rancangan dan sebagainya).⁴⁰ Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai, dan sikap. Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran.⁴¹

Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan, sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya.⁴²

³⁹Lampiran, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2014 *Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah*.

⁴⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 348

⁴¹ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 211

⁴² Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm. 238

Menurut Syukur (1986:396), ada tiga unsur penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan,(3) unsur pelaksana (implemnetor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implentasi tersebut.⁴³

Selanjutnya, Wibawa (1992) mengutip pendapat Rippley dan Franklin bahwa keberhasilan implentasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (1) perspektif kepatuhan, (2) kelancaran rutinintas dan ketiadaan persolan, (3) kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.⁴⁴

Kaitannya dengan Evaluasi implementasi, dimana evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusunn program selanjutnya.

Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak/ hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait.⁴⁵

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan seperti dikutip dari William N. Dunn, digunakan kriteria-kriteria evaluasi hasil

⁴³ Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.104

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.105

⁴⁵ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.6

kebijakan mencakup; efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsivitas, dan ketepatan.⁴⁶

Selanjutnya William N. Dunn juga, membagi tipe evaluasi berdasarkan waktu memantau hasil kebijakan menjadi dua, pertama evaluasi formatif yaitu biasanya dilaksanakan ketika proses berlangsung, kedua evaluasi sumatif dilakukan di akhir sebagai evaluasi final.

Evaluasi kurikulum sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki substansi kurikulum, prosedur implementasi, metode instruksional, serta pengaruhnya pada belajar dan perilaku siswa.⁴⁷ Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dalam berbagai tahap. Dalam tahap pengembangan ide, tahap perumusan konsep, tahap implementasi/penerapan, dan tahap hasil yang memberikan dampak terhadap masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hal yang diungkapkan Kemdikbud yang mengatakan bahwa “evaluasi kurikulum dapat dilakukan sejak masa pengembangan ide, pengembangan dokumen, tahap implementasi, sampai tahap hasil yang memberi dampak ke masyarakat”.⁴⁸

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a bahwa evaluasi kurikulum sebagai serangkaian tindakan sistematis dalam mengumpulkan informasi, pemberian pertimbangan dan keputusan mengenai nilai dan makna kurikulum. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan mulai dari tingkat pusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tingkat pelaksana oleh masing-masing satuan pendidikan. Kegiatan evaluasi penting untuk dilakukan guna mengetahui keterlaksanaan kurikulum yang telah diimplementasikan. Kurikulum telah mengalami perubahan sesuai dengan

⁴⁶ Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 234-236

⁴⁷ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hlm. 191

⁴⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81a Tahun 2013 *tentang Implementasi Kurikulum*.

perkembangan zaman. Kurikulum berubah sesuai konteks waktu. Evaluasi kurikulum juga bisa di artikan sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai nilai dan arti kurikulum dalam suatu konteks tertentu.⁴⁹

b. Model-model Evaluasi Kurikulum

Banyak pakar evaluasi yang mengelompokkan model-model evaluasi dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah Zaenal Arifin, yang mengelompokkan sepuluh model evaluasi yaitu model Tyler, model yang berorientasi pada tujuan, model pengukuran, model kesesuaian, model evaluasi sistem pendidikan, model Alkin, model Brinkerhoff, model illuminatif, model responsif, dan model studi kasus.⁵⁰ Selain itu, Nana Syaodih S. berpendapat bahwa model-model evaluasi kurikulum dibagi menjadi tiga, yaitu evaluasi model penelitian, evaluasi model objektif, dan model campuran multivariasi.⁵¹ Hamid Hasan, mengemukakan pengelompokkan model-model evaluasi kurikulum sebagai berikut:⁵²

- 1) Model evaluasi kuantitatif: Model *Black Box Tyler*, Model Teoritik Taylor dan Maguire, Model Pendekatan Sistem Alkin, Model *Countenance Stake*, Model CIPP.
- 2) Model evaluasi kualitatif: Model Studi Kasus, Model illuminatif, Model *Responsive*.
- 3) Model ekonomi mikro

Berikut penjelasan mengenai Model-model Evaluasi Kurikulum:

- 1) Model Tyler

Model ini dilakukan dengan menunjukkan evaluasi kepada tingkah laku siswa dan evaluasi harus dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan

⁴⁹ Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 41

⁵⁰ Zaenal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 281

⁵¹ Nana Syaodih S., *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 185-189

⁵² Hamid Hasan, *Op.cit.*, hlm. 187-238

kurikulum pada tingkah laku siswa. Menurutnya, evaluasi kurikulum yang sesungguhnya hanya berkaitan dengan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa diketahui dari pengadaaan tes awal dan tes akhir atau dikenal dengan *Black Box* karena menimbulkan berbagai macam teka-teki yang masih dipertanyakan.

2) Model *Countenance Stake*

Model ini dikembangkan oleh Stake. Menurut Farida Yusuf T.,⁵³ dalam model ini evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Suatu evaluasi juga harus sampai pada bagian pertimbangan. Dalam model evaluasi ini, evaluator harus memperhatikan keadaan sebelum suatu kegiatan kelas berlangsung dan terhadap kegiatan kelas itu sendiri dan menghubungkannya dengan hasil belajar siswa.

3) Model CIPP

Model CIPP dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam. CIPP merupakan singkatan dari *Context*, *Input*, *Process*, dan *Product*. Keempat komponen tersebut merupakan komponen utama yang menjadi fokus evaluasi. Sukardi menjelaskan komponen tersebut sebagai berikut:⁵⁴

- a) evaluasi *context* yang menghasilkan informasi mengenai macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya
- b) evaluasi *input*, menyediakan informasi tentang masukan yang terpilih, butir-butir kekuatan dan kelemahan, strategi, dan desain untuk merealisasikan tujuan
- c) evaluasi *process*, menyediakan informasi untuk para evaluator melakukan prosedur monitoring terpilih yang mungkin baru diimplementasikan
- d) evaluasi *product*, mengakomodasi informasi untuk meyakinkan dalam kondisi apa tujuan dapat dicapai.

⁵³ Farida Yusuf T., *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, hlm.22

⁵⁴ Sukardi, *Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.

4) Model evaluasi formatif-sumatif Scriven

Evaluasi program dalam model ini dibagi menjadi dua fungsi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif memiliki fungsi untuk mengumpulkan data selama suatu program berlangsung guna mengembangkan maupun memodifikasi program agar lebih efektif dan lebih baik lagi. Evaluasi ini dilakukan untuk sebagian program saja, dapat dilakukan secara terus menerus, dan instrumen evaluasi tidak disusun oleh evaluator sendiri. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan untuk mengetahui keberhasilan suatu program pada akhir program. Seperti yang diungkapkan oleh Farida Yusuf T.⁵⁵ bahwa evaluasi sumatif ini digunakan untuk menilai apakah suatu program akan diteruskan atau dihentikan saja. Evaluasi ini dilakukan pada seluruh program dalam satu kali pelaksanaan yang menyeluruh dan instrumen evaluasi terstandar. Penelitian ini menggunakan model evaluasi formatif yang dikemukakan oleh Scriven.

Menurut Purwanto, evaluasi formatif yang diungkapkan oleh Scriven adalah evaluasi yang dilaksanakan pada saat sistem masih dalam pengembangan yang penyempurnannya terus dilakukan atas dasar hasil evaluasi. Model evaluasi formatif diterapkan apabila sebuah program sedang dilaksanakan dan belum ada inovasi terhadap program tersebut. Hasil dari evaluasi formatif ini dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk memperbaiki program di waktu yang akan datang agar tidak terjadi kesalahan yang kedua kalinya. Pada model evaluasi ini tidak seluruh aspek dievaluasi atau hanya sebagian saja.⁵⁶

c. Model Evaluasi Kualitatif Studi Kasus

Model evaluasi kualitatif menurut sejarahnya di Amerika Serikat lahir belakangan dari model evaluasi kuantitatif. Di Inggris, model evaluasi kualitatif lahir sebagai ketidakpuasan terhadap model kuantitatif yang dikembangkan di Amerika Serikat. Suatu hal yang jelas model kualitatif

⁵⁵ *Op.cit.*, hlm. 19

⁵⁶ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 28

dikembangkan dalam evaluasi kurikulum setelah filosofi fenomenologi dan metodologi penelitian kualitatif menjadi alternatif metodologi dalam ilmu pendidikan.⁵⁷

Selain penggunaan metodologi kualitatif ciri khas lain dari model evaluasi kualitatif ialah selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Oleh karena itu, kurikulum dalam dimensi kegiatan atau proses lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dimensi lain suatu kurikulum walaupun harus dikatakan bahwa perhatian utama proses tidak menyebabkan model kualitatif mengabaikan evaluasi terhadap dimensi lain.⁵⁸

Model utama evaluasi kualitatif adalah studi kasus. Demikian kuatnya posisi studi kasus sebagai model utama dilingkungan evaluasi kualitatif sehingga setiap orang berbicara tentang model kualitatif maka studi kasus segera muncul dalam kotak memorinya. Sesuai dengan namanya, evaluasi yang menggunakan model studi kasus memusatkan perhatiannya kepada kegiatan pengembangan kurikulum di satu satuan pendidikan. Unit tersebut dapat saja berupa satu sekolah, satu kelas bahkan hanya terhadap seorang guru atau kepala sekolah.

1) Karakteristik Evaluasi Kualitatif Studi Kasus

Evaluasi kualitatif studi kasus mempunyai beberapa karakteristik; *Pertama*, hasil evaluasi tidak mungkin digeneralisasikan dan hanya dinyatakan *shahih* untuk satuan pendidikan dimana evaluasi itu dilakukan karena generalisasi hasil evaluasi bukan menjadi kepedulian atau konsep penting dalam model kualitatif.

Kedua, data yang dikumpulkan terutama adalah data kualitatif. Data kualitatif kaya dengan deskripsi dan dianggap lebih memberikan makna dibandingkan data kuantitatif. Data kualitatif dianggap lebih dapat mengungkapkan apa yang terjadi dilapangan. Proses yang direkam tidak

⁵⁷ Hamid Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 226

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 227

dinyatakan dengan angka tetapi dengan ungkapan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa dalam proses sebagai suatu rangkaian berkesinambungan. Meskipun demikian, model studi kasus tidak menolak pemakaian data kuantitatif apabila data tersebut memang diperlukan, tetapi bukan dalam pengertian data nominal yang dalam statistik dimaknai sebagai data kualitatif. Penolakan yang dilakukan oleh model studi kasus adalah prosedur pengumpulan data kuantitatif yang harus memenuhi persyaratan metodologi kuantitatif.⁵⁹

Ketiga, pengakuan adanya kenyataan yang banyak atau jamak. Menurut pandangan kualitatif, kenyataan adalah kebenaran yang berhubungan dengan konteks dan persepsi individu yang terlibat di dalamnya. Jadi menurut pandangan kualitatif, kenyataan bukan sesuatu yang dipersepsi oleh evaluator atau orang yang memberi tugas kepada evaluator atau kebenaran yang diakui banyak orang. Jumlah orang yang mengakui sesuatu sebagai suatu kebenaran bukan suatu kemutlakan dan hanya menghasilkan kebenaran yang sifatnya inter subjektif.⁶⁰

2) Prosedur Evaluasi Kualitatif Studi Kasus

Dalam menggunakan model evaluasi studi kasus, *prosedur pertama* yang harus dilakukan adalah menentukan fokus penelitian. Penentuan fokus evaluasi dilakukan evaluator setelah mempelajari karakteristik kurikulum yang akan dievaluasi. Berdasarkan wawasan dan pemahaman maka evaluator dapat merumuskan fokus evaluasi. tindakan pertama yang harus dilakukan evaluator ialah familiarisasi dirinya terhadap kurikulum yang dikaji. Familiarisasi ini sangat penting sehingga dapat dikatakan bahwa evaluator yang tidak familiar terhadap kurikulum dan lingkungan satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tidak boleh melakukan evaluasi.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 228

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 229

Prosedur kedua, adalah perumusan masalah dan pengumpulan data. Proses penentuan fokus diakhiri dengan perumusan masalah dan pertanyaan evaluasi. Adanya masalah dan rumusan pertanyaan evaluasi sangat membantu dalam membentuk langkah berikutnya yaitu melakukan pekerjaan evaluasi yang diawali dengan pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data evaluator harus familiar dengan kurikulum yang dikaji. Ada dua jenis familiarisasi yang harus dilakukan dan keduanya mempunyai fungsi dan waktu yang berbeda. Kedua familiarisasi tersebut saling berhubungan dan saling mendukung. Familiarisasi pertama adalah familiarisasi terhadap kurikulum sebagai ide dan sebagai rencana, familiarisasi kedua adalah familiarisasi terhadap lapangan. Di sini untuk beberapa waktu, tergantung dari keadaan lapangan dan pendekatan yang dilakukan, evaluator harus menguasai kebiasaan-kebiasaan yang ada disatuan pendidikan yang dievaluasi sehingga evaluator tidak lagi merasa sebagai orang asing ditempat tersebut. Dengan familiarisasi tersebut barulah evaluator dapat mengobservasi lapangan dengan baik. Dalam hal ini posisi evaluator adalah sebagai instrumen dimana memungkinkan bisa merubah dari masalah atau isu yang sudah teridentifikasi sebelumnya.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sangat dianjurkan dalam model studi kasus. Observasi adalah alat yang memiliki fokus utama pada proses dan proses adalah kepedulian utama model evaluasi kualitatif. Oleh karena itu, penggunaan observasi sejalan dengan fokus model evaluasi kualitatif.⁶¹

Prosedur ketiga adalah proses pengolahan data, selama proses pengumpulan data terjadi maka terus menerus dilakukan pengolahan data dan proses rekonstruksi. Jika dalam proses data ada hal yang tidak dipahami maka harus menghubungi kembali responden yang datanya tidak jelas atau mungkin salah tafsir. Ketika menemukan hal-hal yang

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 230

tidak dipahami ketika melakukan rekonstruksi tentang aktifitas pengembangan kurikulum yang sedang dievaluasi maka harus kembali kepada sumber informasi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Kuesioner dapat pula digunakan dalam pengumpulan data kualitatif. Apabila ingin mengetahui persepsi guru tentang kurikulum yang berlaku, yaitu dengan mengumpulkan data tersebut dengan wawancara.

Data yang sudah dikumpulkan langsung diolah. Pengolahan data sebaiknya dilakukan ketika masih berada di lapangan dan masih dalam proses pengumpulan data. Cara ini memiliki beberapa keuntungan di antaranya adalah apabila ada persoalan baru yang muncul dari hasil analisis data, maka masih memiliki kesempatan untuk segera menelusuri informasi yang diperlukan. Kedua, apabila ada hal hal yang tidak jelas maka dapat segera dikomunikasikan kembali. Ketiga, waktu untuk kegiatan evaluasi dapat dipersingkat karena data sudah diolah⁶²

3) Prinsip Evaluasi Kualitatif Studi Kasus

Dalam melakukan evaluasi kurikulum seorang evaluator kurikulum harus memenuhi prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Ada dua prinsip yang harus dipenuhi oleh evaluator kurikulum, *pertama* prinsip tepat waktu dan yang *kedua* adalah prinsip objektivitas.

Prinsip tepat waktu ini akan sangat berpengaruh terhadap aspek *utility* suatu pekerjaan evaluasi. Pekerjaan evaluasi yang dikategorikan sebagai evaluasi dampak dilakukan harus tepat waktu yaitu ketika suatu kurikulum masih dinyatakan berlaku. Ketika suatu kurikulum sudah dinyatakan tidak lagi berlaku apalagi ketika suatu kurikulum baru sudah berlaku, maka evaluator akan mengalami kesulitan dalam menemukan bukti dan menentukan dampak suatu kurikulum.

Prinsip objektivitas sangat penting dalam suatu evaluasi kurikulum karena hasil suatu evaluasi kurikulum ikut menentukan nasib banyak orang terutama generasi muda. Jika suatu evaluasi kurikulum tidak dilakukan

⁶² *Ibid.*, hlm. 232

atas prinsip objektivitas maka ada kemungkinan besar bahwa evaluasi tersebut menjadi alat untuk mengesahkan suatu kebijakan dan untuk menyenangkan pengambil keputusan.⁶³

6. Faktor-Faktor Penentu Implementasi Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Dengan kreatifitas, anak-anak bangsa mampu berinovasi secara produktif untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin rumit dan kompleks. Meskipun demikian, keberhasilan Kurikulum 2013 dalam menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif, serta dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, kreatifitas guru, aktifitas peserta didik, sosialisasi, fasilitas dan sumber belajar, lingkungan yang kondusif akademik, dan partisipasi warga sekolah.⁶⁴

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepemimpinan kepala sekolah sangat dominan dalam perannya dalam menjalankan roda sekolah. Bahkan, faktor penentu mutu sekolah untuk sebagian besar bertumpu pada kepala sekolahnya. Kepemimpinan kepala sekolah harus mampu bekerja sama dengan komunitasnya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Konsepsi kepemimpinan itu menggamit dua hal, yaitu pemimpin dan pengikut (*leader and follower*), atau kepemimpinan adalah kepengikutan (*leadership is followership*). Kepala sekolah sangat mungkin tidak berdaya, jika guru dan staf tidak mampu menjadi pengikut yang secara total berniat untuk mengabdikan diri pada kepentingan pendidikan sekolahnya.⁶⁵

⁶³ *Ibid.*, hlm. 157-158

⁶⁴ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 39

⁶⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Komunitas Pembelajar*, Bumi Aksara, Bandung, 2003, hlm. 181

Selain itu pemimpin pendidikan atau kepala sekolah harus menganut kaidah-kaidah pemimpin pendidikan yaitu;

- a) Bertindak dengan menggunakan prinsip keadilan, dimana pemimpin harus mampu berbuat adil terhadap anggotanya sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- b) Menjungjung tinggi keasamaan hak anggota komunitas atau konstituen, penghormatan terhadap hak anggota menjadikan kesinambungan komunitas.
- c) Menghargai diversitas atau keragaman potensi dan kebutuhan komunitas atau konstituen, dengan melihat perbedaan sebagai potensi menjadikan kekuatan untuk mengatasi perbedaan yang terjadi.
- d) Membuka peluang atau akses bagi penegetahuan baru, hal ini akan dapat dicapai jika mendapat dukungan kuat dari komunitas profesional untuk mengembangkannya.
- e) Menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan berbagi kekuasaan dan diterjemahkan secara eksplisit di tempat kerja.⁶⁶

Tidak dapat disangkal, kepemimpinan merupakan faktor kunci penentu utama keberhasilan sebuah organisasi dalam mewujudkan visi dan rencana strategisnya. Agar benar-benar dapat berfungsi sebagai faktor kunci penentu utama keberhasilan organisasi, seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan ideal. Kemampuan seorang pemimpin, antara lain mampu menggerakkan orang lain selain dirinya untuk mencapai sebuah tujuan, menciptakan keadaan dan suasana kerja yang kondusif, menumbuhkan motivasi dan rasa memiliki dalam diri orang-orang yang dipimpinnya, menyelaraskan impian orang-orang disekitarnya dengan visi organisasi, memberikan bimbingan serta membuat potensi para anggota tim kerjanya muncul ke permukaan. Tujuan akhirnya adalah mengarahkan para anggota timnya untuk mengimplementasikan rencana strategis yang telah disusun.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 182

Lebih lanjut, Sudarman Danim menyebutkan bahwa seorang pemimpin pendidikan harus mempunyai sembilan kemampuan.

1. Kemampuan berpikir secara visioner berbasis pada potensi yang ada dan yang mungkin diadakan
2. Kemampuan adaptif untuk merespon aneka perubahan internal dan eksternal
3. Kemampuan berbagi misi dengan anggota komunitas sekolah
4. Kemampuan bekerja sebagai agen-agen perubahan
5. Kemampuan memberdayakan diri dengan mengembangkan mental kewirausahaan
6. Kemampuan melakukan kolaborasi dengan kolega
7. Kemampuan melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan agen-agen sosial
8. Berpikir inklusif tentang seluruh konstituennya
9. Memiliki kemampuan teoritis dan dapat mengaplikasikannya kedalam praktik.⁶⁷

Layaknya organisasi yang lain, sekolah juga membutuhkan pemimpin yang ideal agar sekolah dapat maju dan berkembang. Di sekolah swasta, kepemimpinan tertinggi umumnya ada ditangan pengurus yayasan selaku badan penyelenggara sekolah. Para pengurus mengangkat dan memberhentikan kepala sekolah, melaksanakan fungsi pengawasan, mengesahkan visi, rencana strategis, program kerja, dan rencana anggaran tahunan sekolah. Namun, pada kenyataannya, tidak semua anggota pengurus yayasan disiapkan dengan baik sebelum mengemban tugas panggilannya sebagai pucuk pimpinan. Wawasannya tentang dunia pendidikan juga sering sangat terbatas. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah membangkitkan kesadaran dan komitmen untuk belajar mengembangkan wawasan dan kapasitas kepemimpinannya di dunia pendidikan.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 183

Menurut Leithwood (2007) sebagaimana dikemukakan Anita Lie,⁶⁸ pola kepemimpinan terbagi dalam dua macam yaitu pola kepemimpinan transaksional dan transformatif. Pola kepemimpinan transaksional dikenal dengan ciri-ciri berikut:

- a) Memandang penting pemberian penghargaan yang bersifat ekstrinsik, seperti kenaikan gaji, penambahan tunjangan, kenaikan jabatan, dengan tujuan membangun loyalitas dan memotivasi staf;
- b) Memegang teguh ketentuan-ketentuan dan hierarki dalam organisasi secara kaku;
- c) Menunjukkan kecenderungan kuat untuk bersikap mekanistik, sangat ketat dalam menerapkan peraturan dan strategi pengawasan;
- d) Mendasari segala sesuatu dengan kecurigaan atau kekurangan

Berbeda dengan pola kepemimpinan transaksional, pola kepemimpinan transformatif memiliki ciri-ciri berikut:

- a) Lebih kuat dalam menekankan visi, misi, nilai-nilai, dan budaya sekolah;
- b) Lebih memperhatikan dan mengupayakan pengembangan komitmen, karakter, dan kompetensi pribadi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas sekolah;
- c) Menyediakan ruang gerak yang lebih leluasa bagi bertumbuhnya kreatifitas dan inovasi di sekolah;
- d) Mendorong tumbuhnya semangat belajar dan kewirausahaan di antara para guru dan tenaga pendidik;
- e) Lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan

Keberhasilan Kurikulum 2013, menuntut kepala sekolah yang demokratis profesional, sehingga mampu menumbuhkan iklim demokratis di sekolah, yang akan mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi terciptanya kualitas pendidikan dan pembelajaran yang optimal untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik.

⁶⁸ Anita Lie dkk., *Menjadi Sekolah Terbaik*, Tanoto Foundation, Jakarta, 2014, hlm. 81

Kepala sekolah yang mandiri, demokratis, dan professional harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik.⁶⁹

- 1) Pembinaan mental; yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak. Dalam hal ini, kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif agar setiap tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik, secara proporsional dan profesional. Untuk itu kepala sekolah harus berusaha melengkapi sarana, prasarana, dan sumber belajar agar dapat memberi kemudahan kepada para guru dalam melaksanakan tugas utamanya, mengajar. Mengajar dalam arti memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik (*facilitate of learning*).
- 2) Pembinaan moral; yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai suatu perbuatan, sikap dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing tenaga kependidikan. Kepala sekolah profesional harus berusaha memberikan nasehat kepada seluruh warga sekolah, misalnya pada setiap upacara bendera atau pertemuan rutin.
- 3) Pembinaan fisik; yaitu membina para tenaga kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan mereka secara lahiriyah. Kepala sekolah profesional harus mampu memberikan dorongan agar para tenaga kependidikan terlibat secara aktif dan kreatif dalam berbagai kegiatan olah raga, baik yang diprogramkan di sekolah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar sekolah.
- 4) Pembinaan artistik; yaitu membina tenaga kependidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. Hal ini biasanya dilakukan melalui kegiatan karyawisata yang bisa dilaksanakan setiap akhir tahun ajaran. Dalam hal ini, kepala sekolah

⁶⁹ *Op.cit.*, hlm. 40

dibantu oleh para pembantunya harus mampu merencanakan berbagai program pembinaan artistik, seperti karyawisata, agar dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. Lebih dari itu, pembinaan artistik harus terkait atau merupakan pengayaan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan.⁷⁰

b. Kreatifitas Guru

Faktor kedua yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 adalah kreatifitas guru, karena guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam belajar. Kurikulum 2013 akan sulit dilaksanakan di berbagai daerah karena sebagian besar guru belum siap. Ketidaksiapan guru itu tidak hanya terkait dengan urusan kompetensinya, tetapi berkaitan dengan masalah kreatifitasnya, yang juga disebabkan oleh rumusan kurikulum yang lambat disosialisasikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, guru-guru yang bertugas di daerah dan di pedalaman akan sulit mengikuti hal-hal baru dalam waktu singkat, apalagi dengan pendekatan tematik integratif yang memerlukan waktu untuk memahaminya.⁷¹

Guru merupakan elemen yang sangat dominan untuk mewujudkan kualitas lulusan pendidikan, dijelaskan dalam undang-undang bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Oleh karena itu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, guru dalam menjalankan tugas profesinya harus memiliki empat kompetensi, yaitu: *Pertama* kompetensi pedagogik, *kedua* kompetensi kepribadian, *ketiga* kompetensi sosial dan *keempat* kompetensi profesional.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 41

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 41

Selanjutnya dalam menjalankan tugas profesionalnya, guru harus mendasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengemabangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.⁷²

Supaya terwujud proses pembelajaran yang baik guru profesional harus mempunyai kemampuan sebagai berikut:⁷³

- a. Menguasai bahan. Penguasaan materi bagi guru meliputi bahan pokok dan pengayaan. Bahan pokok adalah bahan atau buku yang menjadi pedoman dalam pembelajaran. Sedangkan bahan pengayaan adalah bahan yang menjadi pelengkap atau buku lain yang memiliki relevansi dengan materi pokok
- b. Mampu mengelola interaksi pembelajaran yaitu guru harus memiliki kemampuan memberikan pemahaman materi secara utuh kepada siswa
- c. Mampu memngelola program pembelajaran yaitu guru harus memiliki kemampuan menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP dan pengembangan silabus.

⁷² Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 *tentang Guru dan Dosen*.

⁷³ M. Saekan Muchith, *Pengembangan Kurikulum PAI*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm.7

- d. Mampu mengelola kelas yaitu mampu memberikan motivasi agar siswa memiliki semangat tinggi untuk mempelajari mata pelajaran.
- e. Mampu menggunakan media pendidikan. Ada dua macam media dalam pendidikan yaitu alat pembelajaran dan alat peraga.
- f. Memahami landasan kependidikan, yaitu guru harus mampu memahami benar tentang makna belajar, makna guru dan siswa agar pembelajaran benar-benar sesuai dengan harapan.
- g. Memahami evaluasi, yaitu guru harus memiliki pemahaman yang tepat tentang evaluasi. Bahwa evaluasi tidak hanya untuk mengetahui kualitas pemahaman siswa melainkan juga sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan guru dalam pembelajaran.
- h. Memahami fungsi bimbingan dan layanan bimbingan konseling (BK) yaitu posisi BK jangan hanya diposisikan sebagai satpam atau polisi sekolah yang hanya mencari dan memberi sanksi terhadap kesalahan siswa.
- i. Memahami fungsi administrasi.
- j. Menafsirkan hasil penelitian dalam bidang pendidikan. Guru dalam melakukan pembelajaran juga harus mampu menjelaskan hasil-hasil penelitian yang ada keterkaitannya dengan pokok bahasan yang dijelaskan.

Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, antara lain ingin mengubah pola pendidikan dari orientasi terhadap hasil dan materi pendidikan sebagai proses, melalui pendekatan tematik integratif dengan *contextual teaching and learning* (CTL). Pendekatan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara garis besar, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam CTL adalah sebagai berikut;

- 1) Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilannya barunya.
- 2) Melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topic.
- 3) Mengembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya.
- 4) Menciptakan masyarakat belajar.
- 5) Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran.

- 6) Melakukan refleksi di akhir pertemuan.
- 7) Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara.

Dalam pembelajaran kontekstual, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, dengan menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. Guru bukan hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hapalan, tetapi mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar.⁷⁴

Untuk menciptakan proses pembelajaran di kelas dengan siswa aktif, asyik dan senang, serta hasilnya memuaskan, guru harus menciptakan variasi dalam pengelolaan kelas. Kelas yang didominasi dengan metode ceramah biasanya berjalan secara monoton, kurang menantang, kurang menarik, dan membosankan, serta siswa kurang aktif. Mereka biasanya hanya mendengarkan, mencatat, dan seringkali mengantuk. Pada metode dalam Kurikulum 2013, guru dapat memvariasi pengelolaan kelas sesuai dengan materi yang dibahas, misalnya dengan berpasangan, berkelompok, atau individual.

Guru sebagai fasilitator sedikitnya harus memiliki 7 (tujuh) sikap seperti yang diidentifikasi Rogers sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Tidak berlebihan mempertahankan pendapat dan keyakinannya, atau kurang terbuka;
- 2) Dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya;
- 3) Mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif, dan kreatif, bahkan yang sulit sekalipun;
- 4) Lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti halnya terhadap bahan pembelajaran;
- 5) Dapat menerima balikan (*feedback*), baik yang sifatnya positif maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya;

⁷⁴ *Op.cit.*, hlm. 42

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 43

- 6) Toleransi terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran; dan
- 7) Menghargai prestasi peserta didik, meskipun biasanya mereka sudah tahu prestasi yang dicapainya.

Adapun karakteristik guru yang berhasil mengembangkan pembelajaran secara efektif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Respek dan memahami dirinya, serta dapat mengontrol dirinya (emosinya stabil);
- 2) Antusias dan bergairah terhadap bahan, kelas, dan seluruh kegiatan pembelajaran;
- 3) Berbicara dengan jelas dan komunikatif (dapat mengomunikasikan idenya terhadap peserta didik);
- 4) Memperhatikan perbedaan individual peserta didik;
- 5) Memiliki banyak pengetahuan, inisiatif, kreatif dan banyak akal;
- 6) Menghindari sarkasme dan ejekan terhadap peserta didik, serta
- 7) Tidak menonjolkan diri, dan menjadi teladan bagi peserta didik.

Dalam rangka mensukseskan implementasi Kurikulum 2013, dan menyiapkan guru yang siap menjadi fasilitator pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas; hendaknya diadakan musyawarah antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Musyawarah tersebut diperlukan, terutama untuk menganalisis, mendiskusikan dan memahami buku pedoman dan berbagai hal yang terkait dengan implementasi Kurikulum 2013, antara lain; kerangka dasar dan struktur kurikulum, pedoman implementasi kurikulum 2013, pedoman pengelolaan, pedoman evaluasi kurikulum, standar kompetensi kelulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar, buku guru, buku siswa, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), standar proses dan model pembelajaran, dokumen standar penilaian, pedoman penilaian dan rapor, dan buku pedoman bimbingan dan konseling.⁷⁶

⁷⁶ Mohammad Lamsuri (*ed.*), *Mengelola dan Mendampingi Implementasi Kurikulum 2013*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2014, hlm 4

Buku pedoman dan dokumen-dokumen tersebut, bagi guru yang sudah ikut pendidikan dan pelatihan (diklat), mungkin tidak terlalu masalah, karena sudah ada sedikit pencerahan, tetapi bagi guru yang belum ikut diklat merupakan masalah besar, dan akan menjadi batu sandungan dalam implementasi Kurikulum 2013. Oleh karena itu, alangkah bijaknya seandainya guru-guru yang sudah mengikuti diklat, berinisiatif secara kreatif untuk memahamkan guru-guru lain di sekolahnya, sehingga semuanya siap mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum 2013.⁷⁷

c. Aktifitas Peserta Didik

Pengalaman adalah suatu interaksi antara individu dengan lingkungan. Dengan interaksi dimaksud adanya *aksi* dari lingkungan berupa perangsang-perangsang dari luar. Selama dijaga, maka dibanjiri oleh perangsang-perangsang. Akan tetapi semua perangsang itu menjadi pengalaman. Untuk itu harus *bereaksi*. Misalnya, merangsang dari luar itu harus ditafsirkan, bila dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman yang lampau, harus dirumuskan dengan kata-kata sendiri, dan lain-lain. Seorang yang telah membuat perjalanan yang jauh atau yang sudah hidup lama, belum tentu mempunyai pengalaman yang banyak. Tergantung pada reaksi seseorang terhadap perangsang-perangsang yang diterimanya selama hidupnya. Reaksi mengandung *aktifitas*. Makin banyak memberikan aktifitas kepada sesuatu, makin dalam menguasainya. Pelajaran tidak segera dikuasai dengan mendengarkan atau membacanya saja. Masih perlu lagi kegiatan-kegiatan lain seperti membuat rangkuman, mengadakan Tanya jawab atau diskusi dengan teman-teman, mencoba menjelaskan kepada orang lain. Dengan aktifitas tidak hanya dimaksud aktifitas jasmani saja, melainkan juga aktifitas rohani. Dan sebenarnya kedua-duanya harus dihubungkan. Menurut *Piaget* seorang anak berpikir sepanjang anak tersebut berbuat. Tanpa perbuatan, anak tidak berpikir. Agar anak berpikir sendiri, anak harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Berpikir pada taraf verbal baru timbul

⁷⁷ *Op.cit.*, hlm. 44

setelah anak berpikir pada taraf perbuatan.⁷⁸ Keaktifan jasmani maupun rohani itu meliputi antara lain:

- 1) Keaktifan indera: Pendengaran, penglihatan, peraba dan lain-lain. Siswa harus dirangsang agar dapat menggunakan alat inderanya sebaik mungkin. Mendikte atau menyuruh mereka menulis terus sepanjang jam pelajaran akan menjemukan. Demikian pula menerangkan terus tanpa menulis sesuatu di papan tulis. Maka pergantian dari membaca ke menulis, menulis ke menerangkan dan seterusnya akan lebih menarik dan menyenangkan.
- 2) Keaktifan akal: Akal anak-anak harus aktif atau diaktifkan untuk memecahkan masalah. Menimbang-nimbang; menyusun pendapat dan mengambil keputusan.
- 3) Keaktifan ingatan: Pada waktu mengajar anak harus aktif menerima bahan pengajaran yang disampaikan oleh guru, dan menyimpannya dalam otak. Kemudian pada suatu saat anak siap dan mampu mengutarakan kembali.
- 4) Keaktifan emosi: Dalam hal ini siswa hendaklah senantiasa berusaha mencintai pelajarannya. Bukankah senang ataupun tidak siswa tetap dimintai pertanggungjawaban. Maka tak ada gunanya membenci atau mencintai pelajaran. Sesungguhnya mencintai pelajaran akan menambah hasil studi seseorang.⁷⁹

Paul B. Diedrich membuat suatu daftar yang berisi 117 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut:⁸⁰

- 1) *Visual activities*, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
- 2) *Oral activities*, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi.

⁷⁸ S. Nasution, *Didaktik Asas-asas Mengajar*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm.88-89.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 90-91

⁸⁰ *Op.Cit.*, hlm. 45

- 3) *Listening activities*, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato.
- 4) *Writing activities*, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.
- 5) *Drawing activities*, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta, diagram.
- 6) *Motor activities*, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak.
- 7) *Mental activities*, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.
- 8) *Emotional activities*, seperti misalnya: menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.

Jadi dengan klasifikasi aktivitas seperti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa aktivitas di sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Kalau berbagai macam kegiatan tersebut dapat di ciptakan di sekolah, tentu sekolah-sekolah akan lebih dinamis, tidak membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal dan bahkan akan memperlancar perannya sebagai pusat dan transformasi kebudayaan. Tetapi sebaliknya ini semua merupakan tantangan yang menuntut jawaban dari para guru. Kreativita guru mutlak diperlukan agar dapat merencanakan kegiatan siswa yang sangat bervariasi itu.⁸¹

Aktifitas peserta didik merupakan kunci ketiga yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. Dalam rangka mendorong dan mengembangkan aktifitas peserta didik, guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik, terutama disiplin diri (*self-discipline*). Guru harus mampu membantu peserta didik mengembangkan pola perilakunya; meningkatkan standar perilakunya; dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan

⁸¹ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.101-102.

disiplin dalam setiap aktifitasnya. Untuk mendisiplinkan peserta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap demokratis; sehingga peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh, dan untuk peserta didik, sedangkan guru *tut wuri handayani*. Dalam hal ini, guru harus mampu memerankan diri sebagai pengemban ketertiban, yakni patut *digugu, ditiru, dan diteladani*, tetapi tidak bersikap otoriter.

Memperhatikan pendapat Reisman and Payne (1987), dapat dikemukakan 9 (sembilan) strategi untuk mendisiplinkan peserta didik, sebagai berikut:⁸²

- 1) Konsep diri (*self-concept*); strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep diri masing-masing individu merupakan faktor penting dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkan konsep diri, guru disarankan bersikap empatik, menerima, hangat, dan terbuka, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi pikiran dan perasaannya dalam memecahkan masalah.
- 2) Keterampilan berkomunikasi (*communication skills*); guru harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif agar mampu menerima semua perasaan, dan mendorong timbulnya kepatuhan peserta didik.
- 3) Konsekuensi-konsekuensi logis dan alami (*natural and logical consequences*); perilaku-perilaku yang salah terjadi karena peserta didik telah mengembangkan kepercayaan yang salah terhadap dirinya. Hal ini mendorong munculnya perilaku-perilaku salah. Untuk itu, guru disarankan: a) menunjukkan secara tepat tujuan perilaku yang salah, sehingga membantu peserta didik dalam mengatasi perilakunya, dan b) memanfaatkan akibat-akibat logis dan alami dari perilaku yang salah.
- 4) Klarifikasi nilai (*values clarification*); strategi ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam menjawab pertanyaannya sendiri tentang nilai-nilai dan membentuk sistem nilainya sendiri.

⁸² *Op.Cit.*, hlm. 46

- 5) Analisis transaksional (*transactional analysis*); disarankan agar guru belajar sebagai orang dewasa, terutama apabila berhadapan dengan peserta didik yang menghadapi masalah.
- 6) Terapi realitas (*reality therapy*); sekolah harus berupaya mengurangi kegagalan dan meningkatkan keterlibatan. Dalam hal ini guru harus bersikap positif dan bertanggung-jawab.
- 7) Disiplin yang terintegrasi (*assertive discipline*); metode ini menekankan pengendalian penuh oleh guru untuk mengembangkan dan mempertahankan peraturan. Prinsip-prinsip modifikasi perilaku yang sistematis diimplementasikan di kelas, termasuk pemanfaatan papan tulis untuk menuliskan nama-nama peserta didik yang berperilaku menyimpang.
- 8) Modifikasi perilaku (*behaviour modification*); perilaku salah disebabkan oleh lingkungan, sebagai tindakan remediasi. Sehubungan hal tersebut, dalam pembelajaran perlu diciptakan lingkungan yang kondusif.
- 9) Tantangan bagi disiplin (*dare to discipline*); guru diharapkan cekatan, sangat terorganisasi, dan dalam pengendalian yang tegas. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa peserta didik akan menghadapi keterbatasan pada hari-hari pertama di sekolah, dan guru perlu membiarkan mereka untuk mengetahui siapa yang berbeda dalam posisi sebagai pemimpin.

d. Sosialisasi Kurikulum 2013

Faktor keempat yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 adalah sosialisasi. Sosialisasi dalam implementasi kurikulum sangat penting dilakukan, agar semua pihak yang terlibat dalam implementasinya di lapangan paham dengan perubahan yang harus dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga mereka memberikan dukungan terhadap perubahan kurikulum yang dilakukan. Dalam hal ini seharusnya pemerintah mengembangkan *grand design* yang jelas dan menyeluruh, agar konsep kurikulum yang diimplementasikan dapat dipahami

oleh para pelaksana secara utuh, tidak ditangkap secara parsial, keliru atau salah paham.⁸³

Sosialisasi kurikulum perlu dilakukan terhadap berbagai pihak yang terkait dalam implementasinya, serta terhadap seluruh warga sekolah, bahkan terhadap masyarakat dan orang tua peserta didik. Sosialisasi ini penting, terutama agar seluruh warga sekolah mengenal dan memahami visi dan misi sekolah, serta kurikulum yang akan di implementasikannya. Sosialisasi bisa dilakukan oleh jajaran pendidikan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) secara proporsional dan profesional. Di tingkat sekolah, sosialisasi bisa langsung oleh kepala sekolah apabila yang bersangkutan sudah mengenal dan cukup memahaminya. Namun demikian, jika kepala sekolah belum begitu memahami, atau masih belum mantap dengan konsep-konsep perubahan kurikulum yang dilakukan, maka bisa mengundang ahlinya yang ada di masyarakat, baik dari kalangan pemerintah, akademisi, maupun dari kalangan penulis atau pengamat pendidikan. Sosialisasi perlu dilakukan secara matang kepada berbagai pihak agar kurikulum baru yang ditawarkan dapat dipahami dan diterapkan secara optimal, karena sosialisasi merupakan langkah penting yang akan menunjang dan menentukan keberhasilan perubahan kurikulum.⁸⁴

e. Fasilitas dan Sumber Belajar

Faktor kelima yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 adalah fasilitas dan sumber belajar yang memadai, agar kurikulum yang sudah dirancang dapat dilaksanakan secara optimal. Fasilitas dan sumber belajar yang perlu dikembangkan dalam mendukung suksesnya implementasi kurikulum antara lain laboratorium, pusat sumber belajar, dan perpustakaan, serta tenaga pengelola dan peningkatan kemampuan pengelolanya. Fasilitas dan sumber belajar tersebut perlu didayagunakan

⁸³ *Ibid.*, hlm. 47

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 48

seoptimal mungkin, dipelihara, dan disimpan dengan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, kreatifitas guru dan peserta didik perlu senantiasa ditingkatkan untuk membuat dan mengembangkan alat-alat pembelajaran serta alat peraga lain yang berguna bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Kreativitas tersebut diperlukan, bukan semata-mata karena keterbatasan fasilitas dan dana dari pemerintah, tetapi merupakan kewajiban yang harus melekat pada setiap guru untuk berkreasi, berimprovisasi, berinisiatif dan inovatif.

Dalam pengembangan fasilitas dan sumber belajar, guru di samping harus mampu membuat sendiri alat pembelajaran dan alat peraga, juga harus berinisiatif mendayagunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber belajar yang lebih kongkret. Pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar, misalnya memanfaatkan batu-batuan, tanah, tumbuh-tumbuhan, keadaan alam, pasar, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kehidupan yang berkembang di masyarakat. Untuk kepentingan tersebut, perlu senantiasa diupayakan peningkatan pengetahuan guru dan didorong terus untuk menjadi guru yang kreatif dan profesional, terutama dalam pengadaan serta pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar secara luas, untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal. Upaya ini harus menjadi kepedulian bersama antara kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah secara proporsional.⁸⁵

Harus disadari bahwa sampai saat ini, buku pelajaran masih merupakan sumber belajar yang sangat penting bagi para peserta didik, meskipun masih banyak yang tidak memilikinya, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada diluar kota, di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil. Dalam implementasi kurikulum 2013 pemerintah sudah menyiapkan sebagian besar buku-buku wajib yang harus dipelajari oleh peserta didik, termasuk buku guru, dan pedoman belajar peserta didik. Oleh karena itu, pemilihan buku pelajaran hendaknya mengutamakan buku wajib, yang langsung berkaitan dengan pencapaian kompetensi tertentu. Sedangkan pemilihan buku

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 52

pelengkap hendaknya tetap berpedoman pada rekomendasi atau pengesahan dari dinas pendidikan, dan pertimbangan lain yang tidak memberatkan orang tua. Sehubungan dengan itu, hendaknya kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah tidak memaksakan kepada peserta didik untuk membeli buku terbitan tertentu setiap tahun. Sebaiknya peserta didik dianjurkan menggunakan buku-buku bekas milik kakak atau keluarga lain yang sudah tidak dipakai lagi. Ini penting, karena dalam kondisi ekonomi nasional yang carut marut sekarang ini banyak orang tua yang tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikan anaknya. Di samping itu, hal ini mendukung tuntutan reformasi dalam bidang pendidikan, yakni “mengembangkan atau menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.”⁸⁶

f. Lingkungan yang Kondusif Akademik

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar dari individu. Ada pun lingkungan pengajaran merupakan segala apa yang bisa mendukung pengajaran itu sendiri yang dapat difungsikan sebagai “sumber pengajaran” atau “sumber belajar”. Bukan hanya guru dan buku/bahan pelajaran yang menjadi sumber belajar. Apa yang dipelajari peserta didik tidak hanya terbatas pada apa yang disampaikan guru dan apa yang ada di dalam *textbook*. Banyak hal yang dapat dipelajari dan dijadikan sumber belajar peserta didik. Pengajaran yang tidak menghiraukan prinsip lingkungan akan mengakibatkan peserta didik tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan tempat peserta didik hidup. Pengetahuan yang mungkin peserta didik kuasai belum menjamin pada bagaimana peserta didik menerapkan pengetahuannya itu bagi lingkungan yang peserta didik hadapi.

Ada dua macam cara menggunakan lingkungan sebagai sumber pengajaran/balajar.

- 1) Membawa peserta didik dalam lingkungan dan masyarakat untuk keperluan pelajaran (karya wisata, *servis projects*, *school camping*, interview, survei).

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.53-54

- 2) Membawa sumber-sumber dari masyarakat ke dalam kelas pengajaran untuk kepentingan pelajaran (*resources person*, benda-benda, seperti pameran atau koleksi).⁸⁷

Faktor keenam yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 adalah lingkungan yang kondusif-akademik, baik secara fisik maupun non fisik. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah kesehatan sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terpusat pada peserta didik (*student-centered activities*) merupakan iklim yang dapat membangkitkan nafsu, gairah dan semangat belajar. Iklim belajar yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar, sebaliknya iklim belajar yang kurang menyenangkan akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan.

Lingkungan yang kondusif akademik antara lain dapat dikembangkan melalui berbagai layanan dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. Pilihan dan pelayanan individual bagi peserta didik, terutama bagi mereka yang lambat belajar akan membangkitkan nafsu dan semangat belajar, sehingga membuat mereka betah belajar di sekolah.
- 2) Memberikan pembelajaran remedial bagi para peserta didik yang kurang berprestasi, atau berprestasi rendah. Dalam sistem pembelajaran klasikal, sebagian didik akan sulit untuk mengikuti pembelajaran secara optimal, dan menuntut peran ekstra guru untuk memberikan pembelajaran remedial.
- 3) Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Termasuk dalam hal ini, adalah penyediaan bahan pembelajaran yang

⁸⁷ Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.19-20.

menarik dan menantang bagi peserta didik, serta pengelolaan kelas yang tepat, efektif, dan efisien.

- 4) Menciptakan kerjasama saling menghormati, baik antar peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru dan pengelola pembelajaran lain. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan pandangannya tanpa ada rasa takut mendapatkan sanksi atau dipermalukan.
- 5) Melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus mampu memosisikan diri sebagai pembimbing dan manusia sumber.
- 6) Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator, dan sebagai sumber belajar.
- 7) Mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri sendiri (*self evaluation*). Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator harus mampu membantu peserta didik untuk menilai bagaimana mereka memperoleh kemajuan dalam proses belajar yang dilaluinya.⁸⁸

g. Partisipasi Warga Sekolah

Faktor ketujuh yang turut menentukan keberhasilan Kurikulum 2013 adalah partisipasi warga sekolah, khususnya tenaga kependidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam memberdayakan seluruh warga sekolah, khususnya tenaga kependidikan yang tersedia. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan perilaku tenaga kependidikan di sekolah melalui aplikasi berbagai konsep dan teknik manajemen personalia modern.

Manajemen tenaga kependidikan di sekolah harus ditujukan untuk memberdayakan tenaga-tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk

⁸⁸ *Op.cit.*, hlm. 53-54

mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Sehubungan dengan itu, fungsi manajemen tenaga kependidikan di sekolah yang harus dilaksanakan kepala sekolah adalah menarik, mengembangkan, mengkaji, dan memotivasi tenaga kependidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal, membantu tenaga kependidikan mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karir, serta menyelaraskan tujuan individu, kelompok, dan lembaga.

Pelaksanaan manajemen tenaga kependidikan di Indonesia setidaknya mencakup tujuh kegiatan utama, yaitu perencanaan tenaga kependidikan, pengadaan tenaga kependidikan, pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan, promosi dan mutasi, pemberhentian tenaga kependidikan, kompensasi, dan penilaian tenaga kependidikan. Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai, yakni tersedianya tenaga-tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan yang sesuai, serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.⁸⁹

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran hasil-hasil penelitian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan topik yang penulis teliti antara lain:

Pertama, Penelitian Siskandar yang berjudul “*Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah* ” penelitian ini mengkaji tentang evaluasi implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah khususnya Madrasah Aliyah Swasta di Bogor. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Faktor yang menghambat pelaksanaan kurikulum di Madrasah Aliyah Swasta di Bogor antara lain bersumber dari persepsi yang salah terhadap kurikulum yang baru, hambatan saat membuat perencanaan pembelajaran, hambatan saat pelaksanaan di kelas, hambatan dalam penilaian hasil belajar, hambatan dalam hal pemanfaatan Teknologi

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 55-56

Informasi, hambatan dalam hal sarana dan prasarana, dan hambatan dalam hal manajemen madrasah.⁹⁰

Kemiripan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama tentang evaluasi implementasi Kurikulum 2013. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas membahas tentang evaluasi implementasi Kurikulum 2013 secara umum. Tetapi penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang evaluasi implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan agama islam.

Kedua, Penelitian Mulyadi Mudis Taruna yang berjudul “*Studi tentang Kesiapan Madrasah Dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Jawa Tengah*” penelitian ini mengkaji tentang kesiapan implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah khususnya Madrasah-madrasah yang ada di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan kesiapan madrasah tsanawiyah (MTs) dalam implementasi Kurikulum 2013. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan kepala MTs, kesiapan guru, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum 2013 di MTs Negeri. Subyek penelitian ini adalah MTs Negeri di Jawa Tengah.⁹¹

Kemiripan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama tentang studi implementasi Kurikulum 2013. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas membahas tentang studi kesiapan implementasi Kurikulum 2013 di tingkat madrasah tsanawiyah negeri (MTsN). Tetapi penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang evaluasi implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan agama islam di tingkat madrasah aliyah (MA) swasta, yaitu MA Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus.

Ketiga, Penelitian Harli Trisdiono yang berjudul “*Evaluasi Diklat Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru Sasaran Jenjang SMP Mata Pelajaran PPKN/IPS*” penelitian ini membahas tentang keefektifan diklat implementasi

⁹⁰ Jurnal Cendekia, Surakarta, Vol. 10, No. 2, Siskandar. 2016. *Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah*.

⁹¹ Jurnal Penelitian dan Pengembangan Agama, Semarang, Vol. 22, No. 01, Mulyadi Mudis Taruna. 2015. *Studi tentang Kesiapan Madrasah Dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Jawa Tengah*.

kurikulum 2013 bagi guru sasaran jenjang SMP mata pelajaran PPKN/IPS LPMP D.I. Yogyakarta Tahun 2015. Subjek penelitian adalah peserta diklat implementasi kurikulum 2013 jenjang SMP mata pelajaran IPS dan PPKN yang diselenggarakan oleh LPMP D.I. Yogyakarta tahun 2015.⁹²

Kemiripan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama tentang studi implementasi Kurikulum 2013. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas membahas tentang keefektifan diklat implementasi kurikulum 2013 bagi guru SMP mata pelajaran PPKN/IPS. Tetapi penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang evaluasi implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran pendidikan agama (PAI) di MA Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus.

C. Kerangka Berpikir

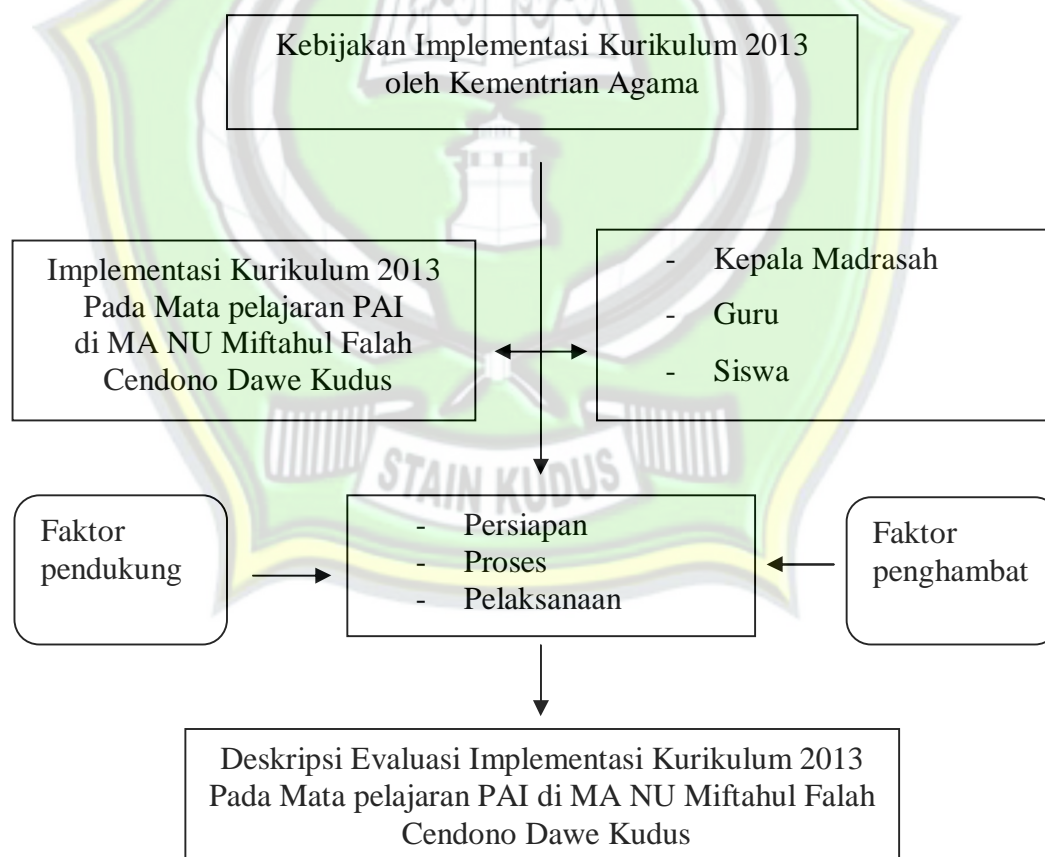
Evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus ini menggunakan model evaluasi kualitatif, dimana model utama evaluasi kualitatif adalah studi kasus (case study). Sesuai dengan namanya, evaluasi yang menggunakan model studi kasus memusatkan perhatiannya kepada kegiatan pengembangan kurikulum di satu satuan pendidikan. Unit tersebut dapat saja berupa satu sekolah, satu kelas bahkan hanya terhadap seorang guru atau kepala sekolah. Karakteristik lain dari model evaluasi kualitatif adalah data yang dikumpulkan terutama adalah data kualitatif. Data kualitatif kaya dengan deskripsi dan dianggap lebih memberikan makna dibandingkan data kuantitatif yang kering. Data kualitatif dianggap lebih dapat mengungkapkan apa yang terjadi dilapangan. Karakteristik model evaluasi kualitatif selanjutnya adalah pengakuan adanya kenyataan yang banyak/jamak (multiple realities).⁹³

⁹²Jurnal LPMP DIY, Yogyakarta, Vol. 07, No. 05, Harli Trisdiono. 2015. *Evaluasi Diklat Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru Sasaran Jenjang SMP Mata Pelajaran PPKN/IPS*.

⁹³ *Op.cit.*, hlm. 227

Penggunaan model evaluasi kualitatif studi kasus ini agar dapat mendeskripsikan pelaksanaan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus alurnya adalah mulai dari kebijakan pemberlakuan Kurikulum 2013 oleh Kementrian Agama sebagai landasan hingga implementasi. Implmentasi tersebut mulai dari tahap proses persiapan, proses pelaksanaan, serta faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung yang dihadapi madrasah baik dari sisi sarana prasarana maupun sumberdaya kepala madrasah, guru dan siswa dalam melaksanakan Kurikulum 2013 dan pada akhirnya akan diketahui dampak atau pengaruh dari pemberlakuan Kurikulum 2013 Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MA NU Miftahul Falah Cendono Dawe Kudus.

Apabila digambarkan maka diperoleh kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1

Bagan kerangka pikir penelitian